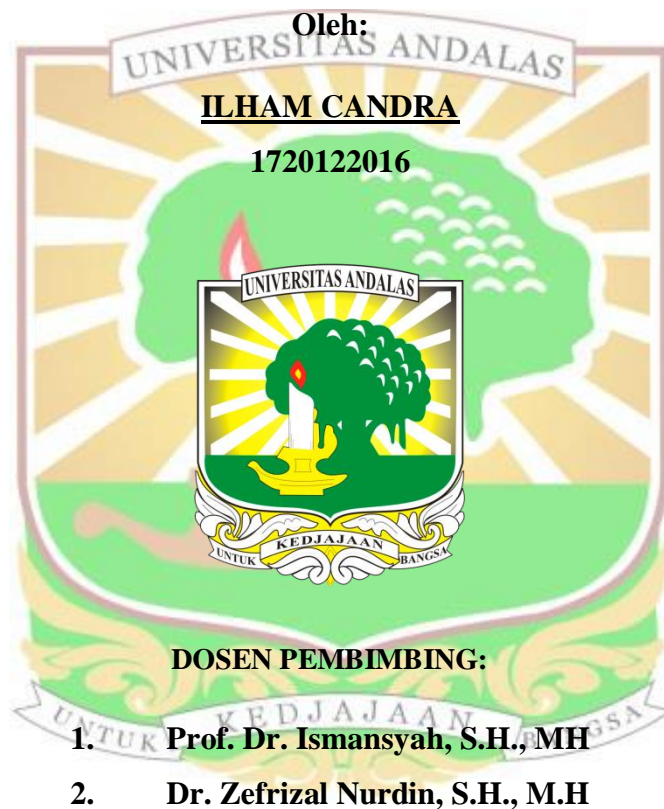


TESIS

**KEDUDUKAN RANJI SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas*



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

KEDUDUKAN RANJI SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

(Ilham Candra, BP:1720122016, Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 117 halaman, 2021)

ABSTRAK

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Terkhusus untuk harta pusaka tinggi merupakan milik kaum yang terdiri dari kesatuan kekerabatan keluarga besar dalam suatu suku atau kaum yang diatur pemanfaatannya oleh ninik mamak atau penghulu. Ranji merupakan hal yang sangat penting jika terjadi sengketa harta pusaka tinggi di Minangkabau. Didalam berbagai putusan perkara pusaka tinggi baik melalui proses non litigasi dan litigasi, sebagai alat bukti tertulis namun keabsahan ranji juga ditelusuri dengan jelas, jadi kedudukan ranji sebagai alat bukti tertulis mempunyai kekuatan pembuktian bersifat mengikat. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah tesis dengan meneliti tentang Bagaimana proses pembuatan ranji suatu kaum dilingkungan Kerapatan Adat Nagari Pauh V, bagaimana kedudukan ranji sebagai alat bukti tertulis dalam penyelesaian sengketa pusaka tinggi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V serta Bagaimana kedudukan pembuktian ranji sebagai alat bukti tertulis pada sidang litigasi (pengadilan). Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan masalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses pembuatan ranji suatu kaum dilingkungan Kerapatan Adat Nagari Pauh V adalah ranji tersebut di buat oleh mamak kepala waris dan diketahui oleh seluruh/perwakilan anggota kaum dalam hal persetujuan anggota kaum. Jika seluruh anggota kaum sepakat untuk membuat ranji maka ranji dibuat serta diketahui oleh penghulu dan ketua (kerapatan Adat Nagari) KAN serta kepala desa. Kedudukan pembuktian ranji sebagai alat bukti tertulis dalam penyelesaian sengketa pusaka tinggi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V yaitu jika terjadi sengketa harta pusaka tinggi maka hal yang paling utama dilakukan adalah meneliti keabsahan ranji yang telah dibuat oleh *ninik kepala waris*. Kemudian *ninik mamak nan bajinih* akan meneliti kembali apakah seluruh anggota kaum benar mengetahui tentang adanya ranji tersebut. Kemudian kekuatan pembuktian ranji sebagai alat bukti tertulis pada sidang litigasi (pengadilan) yaitu ranji tergolong kepada salah satu alat bukti yang terdapat pada Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg yaitu surat. Ranji tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat dipakai dalam proses persidangan perkara harta pusaka tinggi dan sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dari sebuah ranji maka hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan sengketa pusaka tinggi yang terjadi.

Kata Kunci : *Ranji, Alat Bukti, Sengketa Tanah, Pusaka Tinggi* .

RANJI'S POSITION AS WRITTEN EVIDENCE IN THE SETTLEMENT OF HIGH PUSAKO LAND DISPUTES IN CLASS IA PADANG STATE COURT

(Ilham Candra, BP:1720122016, Postgraduate Program Notary Studies, Faculty of Law, Andalas University, 117 pages, 2021)

ABSTRACT

In Minangkabau society there are high inheritance and low inheritance. Especially for high heirlooms, which belong to the people consisting of large family kinship units in a tribe or people whose use is regulated by the *ninik mamak* or *penghulu*. *Ranji* is very important if there is a high inheritance dispute in Minangkabau. In various decisions of the high *pusako* case, both through non-litigation and litigation processes, as written evidence but the validity of the *ranji* is also clearly traced, so the position of *ranji* as written evidence has binding evidentiary power. Based on this, the author is interested in studying it and putting it into a thesis. By examining how the process of making *ranji* of a people in the Nagari Pauh V Customary Density environment, what is the position of *ranji* as written evidence in the resolution of the high *pusako* dispute at the Nagari Customary Density (KAN) Pauh V and how is the position of *ranji*'s proof as written evidence in a litigation trial (court). The writing of this thesis uses an empirical juridical problem approach method that emphasizes the reality in the field associated with the legal aspects or applicable legislation regarding the object of research. From the results of the research, it is known that the process of making *ranji* of a people in the Nagari Pauh V Customary Density is *ranji*. This is made by the *mamak* of the head of the heir and known by all/representatives of the clan members in terms of the approval of the clan members. If all members of the clan agree to make a *ranji*, then the *ranji* is made and known by the *penghulu* and chairman (Kerapatan Adat Nagari) KAN and the village head. The position of proof of *ranji* as written evidence in the settlement of the high *pusako* dispute in the Nagari Customary Density (KAN) Pauh V, namely if there is a high inheritance dispute, the most important thing to do is examine the validity of the *ranji* that has been made by the head of the inheritance. Then *ninik mamak nan bajiniah* will re-examine whether all members of the true clan know about the existence of the *ranji*. Then the strength of the proof of *Ranji* as written evidence at the litigation (court) trial, namely *Ranji* belongs to one of the evidence contained in Article 164 HIR / Article 284 Rbg, namely letters. The *ranji* must be proven true so that it can be used in the trial process of the high *pusako* property case and as long as it can be proven the truth of a *ranji* then it will be taken into consideration for the panel of judges in deciding the high *pusako* dispute that occurs.

Keywords: *Ranji*, Evidence, Land Dispute, *Pusako Tinggi*.